

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammsad, 2001, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Khoirul Umam, et al., 2020, Tantangan Integritas Bisnis Tambang Di Indonesia, Jakarta: Universitas Paramida.
- Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bappenas, 2023, Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2023, Jakarta: Deputi Bidang Ekonomi.
- Busyra Azheri, 2011, Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Chazawi, Adami. (2005). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fani Fortunita, et, al., 2021, Pedoman Hukum Acara Pidana, Jawa Tengah; Pustaka Rumah Cinta.
- Guse Prayudi, 2010, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryono Umar, et. Al., 2021, The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model), Medan: Merdeka Kreasi.
- Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta: Varia Peradilan.
- HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, Jakarta: KPK
- Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Syahrur, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis, Riau; Dotplhus Publisher.

Raisul Mutaqien, 2006, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung: Nusa Media.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press.

Sukandarrumidi, 2020, Bahan-Bahan Galian Industri, Yogyakarta: University Perss.

B. Jurnal dan Artikel

Afshan Uroos et al., 2022, Economic analysis of corruption: evidence from Pakistan, Jurnal Transnational Corporations, Vol. 14 No. 1, Pakistan.

Friskilia Darongke, et el., 2022, Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia, Jurnal Lex Privatum, Vol 10 No. 3.

Fortune Ganda, 2020, The influence of corruption on environmental sustainability in the developing economies of Southern Africa, Jurnal CC BY, Afrika Selatan.

Ilmi Farikhoh dan Anis Chariri, 2022, Analisis Bibliometrik Korupsi di Sektor Publik, Jurnal Antikorupsi, Vol. 8 No. 1, Semarang.

Karunia, Ana Aniza, 2022, Penegakan Hukum Tindak Pisana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol 10 No. 1, Surakarta.

Novita Eka Utami, 2023, Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara, Jurnal LEX Renaissance, Vol 8 No. 2, Yokyakarta.

T. Erwinsyahbana dan M. Melinda, 2018, Kewenangan dan tanggungjawab notaris pengganti setelah pelaksanaan tugas dan jabatan berakhir, Jurnal Lentera Hukum, Vol 5 No. 2, Jember.

Zainab Ompu Jainah, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Pedesaan dan Pembangunan, Vol 6 No. 3, Yokyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 (1) Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Wawancara

Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi SULSEL, Makassar, Wawancara, 5 Desember 2024.

